

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Adrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Penalarannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- A Suriyaman Mustari Pide. 2009. Hukum Adat Dulu Kini dan Akan Datang. Makassar: PT Pelita Pustaka
- Arie Susanti Hutagalung dan Markus Gunawan, (2008). *Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta Sinar Grafika.
- Batara Aditya & Beni Sukadis. 2007. Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara-Negara Transisi Demokrasi. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF & LESPERSI.
- Christoper W. Moore, Mediasi Lingkungan, Jakarta : Center For Environmental Law and CDR Associate
- D. A Tiasnaadmidjaja, 1997. dalam Asep Warlan Yusuf Pranata Pembangunan. *Bandung: Universitas Parahiayang*.

Dominikus Rato. 2010, Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum). Bandung Refika.

Farida Pattitingi, Abrar Saleng, Kahar Lahae, dkk, 2021, Pengkajian Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Padi, Litera, Yogyakarta

Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Muhammad Saifullah, 2007, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia, Semarang: Walisongo Press.

Mukti Fajar Nurdewata. 2010. "Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris". Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Philipus M Hadjon, 2012, Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta.

Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra

Aditya Bakti, Cet. 2, Jakarta, 2013

Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra

Aditya Bakti.

Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, 2023, Hukum Tata Ruang, dalam konsep

kebijakan otonomi daerah, Nuansa Cendekia, Bandung,

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Perss, Jakarta

Soerdjono soekamto & Sri Mamuji (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu

tinjauan singkat.

Takdir Rahmadi, (2010). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan

Mufakat. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada

Waksito dan Hadi Arnowo, 2017, Pertanahan, Agrariam dan Tata Ruang,

Kencana, Jakarta

William Pribadi,. “Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari.” Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional, 2021.

Zainuddin Ali, 2014 Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Makalah

Hermanislamet, Bondan. 1989. Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Hidup: Tata Ruang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Makalah, Bahan Kursus Dasar-dasar Amdal, Kantor Meneg KLH dan PPLH UGM Yogyakarta

JURNAL

Arnowo, H. 2021. Integrasi Peta Tematik Pertanahan Berbasis Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat). *Geo Spatial Proceeding*.

Asmawati. (2004). Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Imu Hukum*, Maret 2004.)

Asrullah Asrullah , Kairuddin Karim, Muh. Darwis Muh. Akbar Fhad Syahril , 2024, Dinamika Pembatalan Hak Atas Tanah: Sebuah Tinjauan Yuridis Komprehensif, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis

Isep H Insan, Vavella Chryzalmantia, Sevti Prana Ningrum, Siti Khodijah, Rizkita Brahmana. (2024). Kajian Hukum Tata Ruang Sengketa Tanah Warga Terhadap Kepentingan Masyarakat Luas (Studi Kasus: Pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 406-415

Istijab, I. (2018). Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agraria. *Widya Yuridika*, 1(1), 234794.

- Iyan Nasriyan, (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02), 87-93.
- Marthalina, M. 2018. Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Nasional. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 149-169.
- Maissy T. P. Dotulung, 2018, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi. *Lex Privatum*, 6(1).
- Muhammad Nur Ansari, Syamsul Bachri, Kahar Lahae. "Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol.9 No.2 November 2020
- Ni Made Silvia Gayatri, I. Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani. 2021, "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi." *Jurnal Analogi Hukum* 3.1
- Pan Mohamad Faiz. 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1
- Rahmawati, U. D., & Bangsawan, M. I. 2022, . Urgensi kebijakan satu peta untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 42-59).

Rendra Adi Wibowo, Bambang Eko Turisno, 2024, Analysis of Land Rights Cancellation Process Due to Administrative Non-Compliance with Applicable Law in Indonesia. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1)

Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 2, 2013

Winsherly Tan, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi Di Indonesia, *NUSANTARA: Jurnal Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No.3, 2021

Zulkifli Aspan, Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup), *Amanna Gappa*, Vol. 25 No. 2 September 2017

Tesis

Eka Meyliza Amaliah, 2020, Pengalihan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 46

Website

Rosyda, Gramedia <https://www.gramedia.com/literasi/negosiasi>, diakses 21 Maret 2025, pukul 11:22

UU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan
Batas Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

"Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak atas
Tanah."

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran
tanah